

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

3.1.2. Belanja

3.1.3. Aset

3.1.4. Kewajiban

3.1.5. Ekuitas

3.1.6. Pendapatan-LO

3.1.7. Beban

3.1.8. Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	668.530.000,00	652.150.000,00	97,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	668.530.000,00	652.150.000,00	97,55
Retribusi Daerah	551.050.000,00	598.750.000,00	108,66
Retribusi Jasa Umum	519.370.000,00	533.770.000,00	102,77
Retribusi Pelayanan Pendidikan	519.370.000,00	533.770.000,00	102,77
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	519.370.000,00	533.770.000,00	102,77
Retribusi Jasa Usaha	31.680.000,00	64.980.000,00	205,11
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	31.680.000,00	64.980.000,00	205,11
Retribusi Pemakaian Ruangan	31.680.000,00	64.980.000,00	205,11
Lain-lain PAD yang Sah	117.480.000,00	53.400.000,00	45,45
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	117.480.000,00	53.400.000,00	45,45
Hasil Sewa BMD	117.480.000,00	53.400.000,00	45,45
Hasil Sewa BMD	117.480.000,00	53.400.000,00	45,45
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	668.530.000,00	652.150.000,00	97,55
JUMLAH PENDAPATAN	668.530.000,00	652.150.000,00	97,55
BELANJA DAERAH	31.713.477.434,00	29.582.124.701,00	93,28
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.082.710.000,00	1.054.648.200,00	97,41
SEKRETARIAT DAERAH	1.082.710.000,00	1.054.648.200,00	97,41
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN	1.082.710.000,00	1.054.648.200,00	97,41
PENINGKATAN BUDAYA	361.729.000,00	349.308.100,00	96,57
Implementasi Budaya Pemerintahan DIY (Validasi Dokumen Kepegawaian)	361.729.000,00	349.308.100,00	96,57
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN	720.981.000,00	705.340.100,00	97,83
Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi	720.981.000,00	705.340.100,00	97,83
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	30.630.767.434,00	28.527.476.501,00	93,13
KEPEGAWAIAN	30.630.767.434,00	28.527.476.501,00	93,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.474.152.934,00	18.895.799.708,00	97,03
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT	126.654.500,00	126.434.500,00	99,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	92.960.500,00	92.805.500,00	99,83
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.703.000,00	6.659.000,00	99,34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.991.000,00	26.970.000,00	99,92
ADMINISTRASI KEUANGAN	15.047.521.234,00	14.631.832.484,00	97,24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.982.196.234,00	14.566.835.984,00	97,23
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.097.000,00	45.823.000,00	99,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.180.000,00	3.176.500,00	99,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.048.000,00	15.997.000,00	99,68

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT	1.142.464.250,00	1.028.605.792,00	90,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.593.000,00	32.568.500,00	99,92
Penyediaan Perakatan dan Perlengkapan Kantor	56.370.000,00	56.291.900,00	99,86
Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	59.436.000,00	59.218.500,00	99,63
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.737.250,00	87.726.250,00	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.000,00	5.850.000,00	90,28
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	899.848.000,00	786.950.642,00	87,45
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	84.398.000,00	79.875.000,00	94,64
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.398.000,00	79.875.000,00	94,64
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.167.067.450,00	1.129.358.824,00	96,77
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.342.000,00	25.925.990,00	98,42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	434.413.850,00	399.108.255,00	91,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.311.600,00	704.324.579,00	99,72
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	1.883.547.500,00	1.877.193.108,00	99,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	10.848.500,00	10.806.000,00	99,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.444.000,00	180.984.200,00	99,75
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.967.000,00	252.520.230,00	99,82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.238.388.000,00	1.236.602.050,00	99,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.900.000,00	196.280.628,00	98,19
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	11.156.614.500,00	9.631.676.793,00	86,33
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	2.498.119.000,00	1.752.011.918,00	70,13
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	91.249.000,00	76.155.150,00	83,46
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	1.302.761.000,00	581.575.618,00	44,64
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	328.642.000,00	322.233.500,00	98,05
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	464.957.500,00	462.510.000,00	99,47
Pengelolaan Data Kepegawaian	310.509.500,00	309.537.650,00	99,69
MUTASI DAN PROMOSI ASN	1.266.333.250,00	1.013.448.100,00	80,03
Pengelolaan Mutasi ASN	231.761.000,00	175.481.250,00	75,72
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	281.261.500,00	243.497.900,00	86,57
Pengelolaan Promosi ASN	753.310.750,00	594.468.950,00	78,91

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	6.950.935.750,00	6.455.592.075,00	92,87
Pengelolaan Assessment Center	1.015.030.500,00	884.082.500,00	87,10
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi	236.968.000,00	232.981.100,00	98,32
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.546.803.000,00	3.484.176.200,00	98,23
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2.000.651.750,00	1.747.600.775,00	87,35
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40.150.000,00	18.886.000,00	47,04
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	111.332.500,00	87.865.500,00	78,92
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA	441.226.500,00	410.624.700,00	93,06
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	38.771.500,00	38.771.500,00	100,00
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi	238.690.500,00	210.988.700,00	88,39
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	21.084.500,00	18.984.500,00	90,04
Pembinaan Disiplin ASN	135.076.500,00	134.276.500,00	99,41
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	7.603.500,00	7.603.500,00	100,00
JUMLAH BELANJA	31.713.477.434,00	29.582.124.701,00	93,28

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada tahun anggaran 2022, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 3 program, 13 kegiatan, dan 44 sub kegiatan. Secara spesifik, hambatan dan kendala dalam pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

1. Retribusi Pemakaian Ruangan

Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp64.980.000,00 yang mana jumlah tersebut lebih dari nominal yang telah dianggarkan sebesar Rp33.300.000,00 atau 105,11%. Hal ini terjadi karena jumlah penyewaan ruang LGD, ruang CCTV, ruang kamar, dan ruang simulasi mengikuti permintaan dari mitra sehingga melebihi nominal yang telah dianggarkan.

2. Hasil Sewa BMD

Realisasi pendapatan Hasil Sewa BMD di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp53.400.000 yang mana jumlah tersebut kurang dari nominal yang

telah dianggarkan sebesar Rp64.080.000 atau 54,55%. Hal ini terjadi karena rekening hasil sewa BMD merupakan pemecahan rekening dari Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk pendapatan dari pelaksanaan Assessment Center Metode Kompleks Tidak Menginap. Akan tetapi setelah dilakukan pemecahan belum dilakukan penyesuaian anggaran sehingga realisasi masih terlalu tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan.

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5.850.000,00 atau 90,28% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp630.000,00 atau 9,72%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal karena pembayaran pada pembelian surat kabar menyesuaikan tagihan dari penyedia dan kebutuhan kantor.

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp786.950.642,00 atau 87,45% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp112.897.358,00 atau 12,55%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening honorarium narasumber dan rekening belanja perjalanan dinas biasa.

Terdapat sisa anggaran sebanyak Rp400.000 atau 9,09% pada rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia. Sisa anggaran tersebut merupakan sisa anggaran belanja karena belanja telah dilakukan sesuai SHBJ.

Sisa anggaran pada rekening belanja perjalanan dinas biasa adalah sebesar Rp112.482.358 atau 13,57%. Sisa anggaran tersebut

terjadi karena pengaruh dari kebijakan eksternal mengenai fasilitasi dan konsultasi JPT Madya yang akan dimulai pada tahun 2023 sehingga anggaran perjalanan dinas tidak dapat terserap secara maksimal pada tahun 2022.

5. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp79.875.000,00 atau 94,645% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp4.523.000,00 atau 5,36%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja modal peralatan computer lainnya.

Sisa anggaran pada rekening belanja modal peralatan computer lainnya adalah sebesar Rp4.505.000,00 atau 6,93% merupakan sisa dari pengadaan langsung.

6. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik**

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp399.108.255,00 atau 91,87% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp35.305.595,00 atau 8,13%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik, dan belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.

Sisa anggaran pada rekening belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, dan belanja tagihan listrik masing masing sebesar Rp2.114.213 (16,63%), Rp15.068.000 (14,49%), dan Rp16.258.542 (5,21%) terjadi karena pembayaran belanja tersebut adalah sesuai dengan tagihan.

Sedangkan sisa anggaran pada belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebanyak Rp1.864.840 atau 93,24 merupakan sisa anggaran karena belanja telah dibayar sesuai dengan besaran tagihan.

7. **Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp76.155.150,00 atau 83,46% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp15.093.850,00 atau 16,54%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja honorarium narasumber.

Sisa anggaran pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja honorarium narasumber masing-masing sebesar Rp84.000 (14,76%), Rp441.850 (17,67%), Rp4.860.000 (13,56%), dan Rp9.600.000 (20,00%) merupakan pengaruh dari kebijakan eksternal (pemerintah pusat) dalam hal pendampingan penyusunan formasi tenaga bantu yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pelarangan tenaga honorer berdasarkan Surat Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.

8. **Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp581.575.618,00 atau 44,64% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp721.185.382,00 atau 55,36%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja bahan cetak, belanja perlengkapan dinas, belanja natura, belanja

makan minum rapat, belanja makan minum aktivitas lapangan, belanja honorarium narasumber, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan, belanja honorarium rohaniawan, belanja sewa *genset*, belanja sewa kendaraan bermotor penumpang, belanja sewa alat kantor lainnya, belanja sewa mebel, belanja sewa alat pendingin, belanja sewa computer jaringan, dan belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.

Sisa anggaran pada rekening-rekening tersebut tidak dapat terealisasi secara maksimal karena adanya factor eksternal dari pemerintah pusat. Factor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya rekrutmen CPNS formasi 2022 karena kebijakan pemerintah pusat
- b. Seleksi PPPK Guru
 - 1) Seleksi administrasi PPPK Tenaga Guru untuk Prioritas 1 (P1) dilaksanakan oleh Kemendikbud dan tidak adanya seleksi kompetensi P1 (menggunakan hasil seleksi 2021) dan Seleksi PPPK Tenaga Guru prioritas 2 dan prioritas 3 tidak menggunakan seleksi kompetensi tetapi seleksi kesesuaian berdasar Kemendikbudristek Nomor 349/P/2022 tanggal 14 September 2022
 - 2) Proses kelulusan, pemberkasan, pengusulan NIP, dan pengangkatan di 2023 berdasar surat Plt. Ka. BKN Nomor 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022
- c. Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan
 - 1) Pelaksanaan Seleksi kompetensi diambil alih oleh Kemenkes berdasar Perdirjen Nakes Nomor HK.01.03/F/2446/2022 tanggal 10 November 2022
 - 2) Proses kelulusan, pemberkasan, pengusulan NIP dan pengangkatan di 2023 berdasar surat Plt. Ka. BKN Nomor 44205/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 30 Desember 2022

- d. Seleksi PPPK Tenaga Teknis formasi 2022 dilaksanakan di 2023 berdasar Surat Plt. Ka.BKN Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 Jakarta tanggal 19 Desember 2022
- e. Rekrutmen tenaga bantu formasi baru tidak terlaksana karena adanya kebijakan pelarangan tenaga honorer berdasar surat Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022

9. Pengelolaan Mutasi ASN

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp175.481.250,00 atau 75,72% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp56.279.750,00 atau 24,28%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja honorarium narasumber, belanja honorarium rohaniawan, dan belanja honorarium penyelenggara ujian.

Sisa anggaran pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja honorarium narasumber, belanja honorarium rohaniawan, dan belanja honorarium penyelenggara ujian masing-masing sebesar Rp91.000,00 (6,03%), Rp12.000.000,00 (65,22%), Rp2.000.000,00 (62,50%), Rp42.000.000,00 (100,00%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena adanya beberapa factor eksternal. Factor-faktor tersebut antara lain:

- a. Penataan JPT Madya dan rotasi belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga anggaran terkait kegiatan tersebut tidak dapat diserap.
- b. Pelaksanaan mutasi luar daerah didasarkan pada minat pegawai dari luar Pemda DIY untuk bergabung ke Pemda DIY.
- c. Penetapan pindah wilayah kerja tergantung pada instansi asal.
- d. Proses di Kemendagri dan BKN yang cukup lama mempengaruhi kejelasan waktu dan TMT pindah.

10. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp243.497.900,00 atau 86,57% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp37.763.600,00 atau 13,43%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja kertas dan cover, belanja bahan computer, belanja honorarium narasumber, dan belanja perjalanan dinas biasa.

Sisa anggaran pada rekening belanja belanja kertas dan cover, belanja bahan computer, belanja honorarium narasumber, dan belanja perjalanan dinas biasa masing-masing sebesar Rp385.000,00 (18,49%), Rp75.000,00 (7,99%), Rp300.000,00 (33,33%), dan Rp36.557.800,00 (27,31%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena adanya efisiensi belanja menggunakan Mbiz Market untuk belanja kertas dan cover serta bahan computer. Sedangkan efisiensi dalam belanja transportasi dan belanja hotel adalah alasan tidak terealisasinya belanja perjalanan dinas secara maksimal.

11. Pengelolaan Promosi ASN

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp594.468.950,00 atau 78,91% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp158.841.800,00 atau 21,09%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja honorarium narasumber, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan, belanja honorarium rohaniwan, dan belanja jasa tenaga Kesehatan.

Sisa anggaran pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja honorarium narasumber, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan, belanja honorarium rohaniwan, dan belanja jasa

tenaga kesehatan masing-masing sebesar Rp521.000,00 (33,99%), 124.000,00 (6,17%), 9.600.000,00 (27,27%), Rp32.300.000,00 (8,14%), Rp2.800.000,00 (43,75%), dan Rp112.849.800 (89,56%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena

- a. besarnya belanja alat tulis kantor setra belanja kertas cover dipengaruhi harga pasar;
- b. honorarium narasumber, tim pelaksana kegiatan, dan rohaniwan internal Pemda DIY tidak dapat dibayarkan; dan
- c. belanja untuk uji kesehatan bergantung pada jumlah peserta seleksi terbuka.

12. Pengelolaan Assessment Center

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp884.082.500,00 atau 87,10% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp130.841.000,00 atau 12,90%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja isi tabung gas, belanja bahan-bahan lainnya, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja sewa alat ukur lainnya, belanja perjalanan dinas biasa, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

Sisa anggaran pada rekening belanja isi tabung gas, belanja bahan-bahan lainnya, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja sewa alat ukur lainnya, dan belanja perjalanan dinas biasa masing-masing sebesar Rp107.000,00 (%), Rp24.000,00 (%), Rp25.380.000,00 (%), Rp84.800.000,00 (%), Rp10.776.000,00 (%), Rp7.524.000,00 (%), dan Rp1.800.000,00 (%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena

- a. harga tabung gas di pasar lebih tinggi daripada SHBJ sehingga kuantitas tidak dapat terpenuhi dan terdapat sisa anggaran;

- b. harga bahan-bahan lainnya (batu baterai) di pasar lebih rendah daripada SHBJ sehingga terdapat sisa anggaran;
- c. BKN belum menetapkan regulasi terkait honor kelebihan jam kerja bagi assessor sehingga anggaran honor kelebihan jam kerja tidak dapat dibayarkan;
- d. adanya perubahan jadwal penilaian kompetensi oleh mitra kerja dan pemberitahuan yang dilakukan secara mendadak dari calon peserta yang sudah terjadwal pada kegiatan penilaian potensi dan kompetensi mengakibatkan penyelenggaran tidak dapat melakukan penggantian peserta; serta
- e. pelaksanaan pengukuran kompetensi menyesuaikan dengan jumlah permintaan pengukuran yang masuk.

13. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.747.600.775,00 atau 87,35% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp253.050.975,00 atau 12,65%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja bahan computer, belanja makan minum rapat, dan belanja diklat kepemimpinan.

Sisa anggaran pada rekening belanja bahan computer, belanja makan minum rapat, dan belanja diklat kepemimpinan masing-masing sebesar Rp384.000,00 (%), Rp690.000,00 (%), dan Rp226.400.000,00 (%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena dipengaruhi oleh jumlah peserta diklat dimana belum semua PNS mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan hanya bergantung pada kebutuhan OPD. Factor lain yang mempengaruhi realisasi yang tidak maksimal adalah karena adanya perubahan kurikulum pelatihan kepemimpinan dari LAN yaitu dari

luring menjadi *blended* sehingga mengakibatkan konstruksi pembiayaan berubah.

14. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp18.886.000,00 atau 47,04% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp21.264.000,00 atau 52,96%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja perjalanan dinas biasa.

Sisa anggaran pada rekening belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja perjalanan dinas biasa masing-masing sebesar Rp6.600.000,00 (34,37%), Rp6.500.000,00 (59,09%), dan Rp8.160.000,00 (100,00%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena dipengaruhi oleh pelaksanaan uji kompetensi yang tidak pasti karena menyesuaikan dengan slot dari pusat dan menyesuaikan dengan peserta. Selain itu, adanya *costsharing* dengan pemerintah pusat dimana SPPD dan honorarium narasumber dibiayai oleh pemerintah pusat juga turut mempengaruhi tidak maksimalnya realisasi belanja. Penggunaan system daring juga menjadi salah satu factor tidak maksimalnya realisasi belanja karena mengakibatkan tidak semua uji kompetensi memerlukan narasumber sekaligus perjalanan dinasnya.

15. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp87.865.500,00 atau 78,92% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp23.467.000,00 atau 21,08%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja bahan

computer, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja honorarium rohaniwan.

Sisa anggaran pada rekening belanja bahan computer, belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja honorarium rohaniwan masing-masing sebesar Rp234.000,00 (21,23%), Rp8.625.000,00 (19,28%), Rp11.900.000,00 (39,14%), dan Rp2.400.000 (50,00%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena dipengaruhi oleh honorarium narasumber internal yang tidak bisa dibayarkan dan beberapa forum pembinaan yang dibiayai oleh instansi Pembina (pusat).

16. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp210.988.700,00,00 atau 88,39% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp27.701.800,00 atau 11,61%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja honorarium penulis butir soal, dan belanja perjalanan dinas biasa.

Sisa anggaran pada rekening belanja alat tulis kantor, belanja bahan cetak, belanja honorarium penulis butir soal, dan belanja perjalanan dinas biasa masing-masing sebesar Rp47.500,00 (6,13%), Rp1.805.000,00 (20,09%), Rp300.000,00 (25,00%), dan Rp25.549.300,00 (15,86%) tidak dapat terealisasi secara maksimal karena dipengaruhi oleh penyerapan anggaran sewa kamar hotel dalam kegiatan MTQ menyesuaikan dengan kebutuhan.

17. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Realisasi belanja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai bagi Pegawai di Badan Kepegawian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp18.984.500,00,00 atau

90,04% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebanyak Rp2.100.000,00 atau 9,96%. Anggaran belanja pada sub kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada rekening belanja honorarium narasumber.

Sisa anggaran pada rekening belanja honorarium narasumber sebesar Rp2.100.000 atau 12,50% tidak dapat terealisasi secara maksimal karena factor waktu penyelesaian Satyalancana Karya Satya di Kemendagri yang terlalu lama yang menyebabkan mundurnya jadwal penyerahan Satyalancana Karya Satya. Hal ini mengakibatkan lokasi kegiatan penyerahan Satyalancana Karya Satya yang awalnya direncanakan sebanyak 12 titik dipangkas menjadi 2 titik sehingga pemberian honorarium kepada petugas penyerahan SLKS menjadi kurang maksimal.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
<u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp652.150.000,00</u>	<u>Rp638.400.000,00</u>

Pendapatan-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp668.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp652.150.000,00 atau 97,55%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Pendapatan-LRA naik sebesar Rp13.750.000,00 atau 2,11%. Rincian dari Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.1.1 <u>Pendapatan Asli Daerah-LRA</u>	<u>Rp652.150.000,00</u>	<u>Rp638.400.000,00</u>

Pendapatan Asli Daerah-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp668.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp652.150.000,00 atau 97,55%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Pendapatan Asli Daerah-LRA naik sebesar Rp13.750.000,00 atau 2,11%. Rincian dari Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	668.530.000,00	652.150.000,00	97,55
1.1	Retribusi Daerah	551.050.000,00	598.750.000,00	108,66
1.1.1	Retribusi Jasa Umum	519.370.000,00	533.770.000,00	102,77
1.1.2	Retribusi Jasa Usaha	31.680.000,00	64.980.000,00	205,11
1.2	Lain-Lain PAD yang Sah	117.480.000,00	53.400.000,00	45,45
1.2.1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	117.480.000,00	53.400.000,00	45,45
Jumlah		668.530.000,00	652.150.000,00	97,55

3.1.2. Belanja

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
<u>Belanja</u>	<u>Rp29.582.124.701,00</u>	<u>Rp28.162.354.731,00</u>

Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp31.713.477.434,00 dengan realisasi sebesar Rp29.582.124.701,00 atau 93,28%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Belanja naik sebesar Rp1.419.769.970,00 atau 4,80%. Rincian dari Belanja adalah sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp29.501.625.701,00</u>	<u>Rp27.000.323.931,00</u>

Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp31.628.410.434,00 dan terealisasi sebesar Rp29.501.625.701,00 atau 93,27%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Belanja Operasi naik sebesar Rp2.501.301.770,00 atau 8,48%. Rincian dari Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.2.1.1 <u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp14.632.055.984,00</u>	<u>Rp14.399.164.239,00</u>

Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.047.416.234,00 dan terealisasi sebesar Rp14.632.055.984,00 atau 97,24%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Belanja Pegawai naik sebesar Rp232.891.745,00 atau 1,59%. Rincian dari Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.035.664.633,00	5.678.564.351,00	94,08
1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.220.545.125,00	4.137.409.540,00	98,03
1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	367.742.191,00	359.774.193,00	97,83
1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	238.020.000,00	236.115.000,00	99,20
1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	181.420.000,00	139.657.000,00	76,98
1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	141.731.000,00	137.795.000,00	97,22

1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	235.757.880,00	232.830.300,00	98,76
1.7	Belanja Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus ASN	9.580.859,00	9.100.389,00	94,98
1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	93.256,00	63.230,00	67,80
1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	603.750.134,00	392.557.396,00	65,02
1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.256.047,00	8.475.647,00	91,57
1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.768.141,00	24.786.656,00	89,26
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.930.000.101,00	8.871.740.133,00	99,35
2.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.846.935.679,00	3.832.707.369,00	99,63
2.2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	697.325.730,00	677.441.850,00	97,15
2.3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	116.413.052,00	115.262.754,00	99,01
2.4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi Kerja ASN	4.269.325.640,00	4.246.328.160,00	99,46
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.751.500,00	81.751.500,00	100,00
3.1	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.531.500,00	16.531.500,00	100,00
3.2	Belanja Honorarium	42.720.000,00	42.720.000,00	100,00

3.3	Belanja jasa Pengelolaan BMD	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
Jumlah		15.047.416.234,00	14.632.055.984,00	97,24

2022 (Audited)

2021 (Audited)

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp14.869.569.717,00 Rp12.601.159.692,00

Belanja Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp16.580.661.200,00 dan terealisasi sebesar Rp14.869.569.717,00 atau 89,68%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp2.268.410.025,00 atau 15,26%. Rincian dari Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	2.423.362.750,00	2.300.712.500,00	94,94
1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.423.362.750,00	2.300.712.500,00	94,94
2	Belanja Jasa	11.364.621.450,00	9.985.461.792,00	87,86
2.1	Belanja Jasa Kantor	3.735.739.950,00	3.150.105.524,00	84,32
2.2	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.505.000,00	543.351.600,00	54,31
2.3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	342.000.000,00	321.338.118,00	93,96
2.4	Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-
2.5	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	0,00	0,00	-

2.6	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	825.295.000,00	820.279.000,00	99,39
2.7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.526.231.000,00	3.466.431.200,00	98,30
2.8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan, dan Pelatihan	1.934.850.500,00	1.683.956.350,00	87,03
3	Belanja Pemeliharaan	1.494.433.000,00	1.489.049.908,00	99,64
3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	199.900.000,00	196.280.628,00	98,19
3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	204.145.000,00	203.898.230,00	99,88
3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	980.388.000,00	979.071.050,00	99,87
3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.000.000,00	109.800.000,00	99,82
3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.298.577.000,00	1.094.345.517,00	84,27
4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.298.577.000,00	1.094.345.517,00	84,27
Jumlah		16.580.994.200,00	14.869.569.717,00	89,68

Dari keseluruhan total belanja barang pakai habis, belanja sebesar Rp1.083.440.500,00 merupakan belanja pembentuk persediaan. Secara terperinci, belanja barang pakai habis pembentuk persediaan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Uraian Persediaan	2022 (Rp)
1	Belanja bahan-bahan kimia	Bahan kimia	1.048.500,00
2	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	Bahan bakar dan pelumas	120.737.500,00

3	Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran	Isi tabung pemadam kebakaran	9.732.000,00
4	Belanja bahan-isi tabung gas	Isi tabung gas	213.000,00
5	Belanja bahan-bahan lainnya	Bahan lainnya	13.458.000,00
6	Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan	Suku cadang alat angkutan	62.512.100,00
7	Belanja suku cadang-suku cadang lainnya	Suku cadang lainnya	4.025.500,00
8	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	Alat tulis kantor	73.282.500,00
9	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	Kertas dan cover	61.275.000,00
10	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	Bahan cetak	189.000,00
11	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	Bahan cetak	436.581.400,00
12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	6.425.000,00
13	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	Benda pos	6.489.000,00
14	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer	Bahan computer	43.472.000,00
15	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	Perabot kantor	36.540.000,00
16	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	Alat listrik	30.670.000,00
17	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas	Perlengkapan dinas	3.280.000,00
18	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata	Suvenir/cendera mata	4.860.000,00
19	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	35.962.000,00

20	Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya	Obat-obatan lainnya	642.000,00
21	Belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya	Alat tulis kantor	280.000,00
22	Belanja natura dan pakan-natura	Natura	890.000,00
23	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	Perlengkapan dinas	7.000.000,00
24	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	Perlengkapan dinas	30.000.000,00
25	Belanja pakaian teknik	Perlengkapan dinas	3.726.000,00
26	Belanja pakaian batik tradisional	Perlengkapan dinas	6.000.000,00
27	Belanja pakaian olahraga	Perlengkapan dinas	84.150.000,00
Jumlah			1.083.440.500,00

Sedangkan sisa belanja barang pakai habis sebesar Rp1.217.272.000,00 yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.168.600.000,00, belanja penambah daya tahan tubuh sebesar Rp21.090.000,00, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Pendidikan sebesar Rp26.082.000, dan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp1.500.000,00 bukanlah belanja pembentuk persediaan karena belanja langsung dibebankan.

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.2.2 <u>Belanja</u>	<u>Rp80.499.000,00</u>	<u>Rp1.162.030.800,00</u>
<u>Modal</u>		

Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp85.067.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.499.000,00 atau 94,63%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Belanja Modal turun sebesar Rp1.081.531.800,00 atau 1.343,53%. Rincian dari Belanja Modal adalah sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.2.2.1 <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>	<u>Rp80.499.000,00</u>	<u>Rp1.162.030.800,00</u>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp85.067.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.499.000,00 atau 94,63%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin turun sebesar Rp1.081.531.800,00 atau 1.343,53%. Rincian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	255.000,00	210.000,00	82,35
1.1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	255.000,00	210.000,00	82,35
1.2	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	-
2	Belanja Modal Alat Laboratorium	414.000,00	414.000,00	100,00

2.1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	414.000,00	414.000,00	100,00
3	Belanja Modal Komputer	65.000.000,00	60.495.000,00	93,07
3.1	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	-
3.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	65.000.000,00	60.495.000,00	93,07
4	Belanja Modal Alat Eksplorasi	19.398.000,00	19.380.000,00	99,91
4.1	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	19.398.000,00	19.380.000,00	99,91
Jumlah		85.067.000,00	80.499.000,00	94,63

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah aset tetap alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp19.380.000,00 (dari belanja modal alat eksplorasi geofisika) dan aset tetap peralatan studio audio sebesar Rp60.495.000,00 (dari belanja modal peralatan computer).

Sedangkan belanja modal lainnya telah direklasifikasi kedalam asset lancar persediaan. Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp414.000,00 telah direklasifikasi ke dalam perlengkapan dinas. Dan belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp210.000,00 telah direklasifikasi ke dalam perabot kantor.

Secara ringkas penjelasan mengenai belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	80.499.000,00
Mutasi masuk menambah asset peralatan dan mesin		
• Belanja modal alat eksplorasi geofisika	Rp	19.380.000,00
• Belanja modal peralatan computer	Rp	60.495.000,00
	Rp	79.875.000,00
Mutasi keluar		
• Reklasifikasi asset alat peraga praktek sekolah menjadi perlengkapan dinas	Rp	414.000,00
• Reklasifikasi asset alat rumah tangga alat pembersih menjadi perabot kantor	Rp	210.000,00
	Rp	624.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	80.499.000,00

3.1.3 Aset

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
Aset	<u>Rp12.036.948.663,06</u>	<u>Rp12.776.443.692,66</u>

Aset Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.036.948.663,06 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp87.946.398,00, Aset Tetap sebesar Rp9.460.696.563,27, dan Aset Lainnya sebesar Rp2.488.305.701,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp87.946.389,00</u>	<u>Rp73.198.898,00</u>

Aset Lancar Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp87.946.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.1.1 <u>Persediaan</u>	<u>Rp87.946.398,00</u>	<u>Rp73.198.898,00</u>

Saldo Persediaan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp87.946.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Barang Pakai Habis	87.946.398,00	73.198.898,00
1.1	Bahan	28.341.000,00	26.900.000,00
1.1.1	Bahan bakar dan pelumas	27.810.000,00	26.900.000,00
1.1.2	Bahan lainnya	531.000,00	0,00
1.2	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	59.605.398,00	46.298.898,00
1.2.1	Alat tulis kantor	6.942.500,00	8.059.300,00
1.2.2	Kertas dan cover	7.469.500,00	5.898.000,00
1.2.3	Bahan cetak	8.038.000,00	526.000,00
1.2.4	Benda pos	400.000,00	0,00
1.2.5	Bahan komputer	3.093.000,00	0,00
1.2.6	Perabot kantor	0,00	820.000,00
1.2.7	Alat listrik	747.000,00	275.000,00
1.2.8	Perlengkapan dinas	28.723.398,00	28.802.598,00
1.2.9	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	4.192.000,00	1.918.000,00
	Jumlah	87.946.398,00	73.198.898,00

Penjelasan secara rinci terkait perubahan nilai persediaan adalah sebagai berikut.

Uraian	2021	Belanja Barang Pakai Habis Pembentuk Persediaan	Reklasifikasi	Pembebanan	2022
Barang Pakai Habis	73.198.898,00	1.083.440.500,00	624.000,00	1.069.317.000,00	87.946.398,00
Bahan Kimia	-	1.048.500,00	-	1.048.500,00	-
Bahan bakar dan pelumas	26.900.000,00	120.737.500,00	-	119.827.500,00	27.810.000,00
Isi tabung pemadam kebakaran	-	9.732.000,00	-	9.732.000,00	-
Isi tabung gas	-	213.000,00	-	213.000,00	-
Bahan lainnya	-	13.458.000,00	-	12.927.000,00	531.000,00
Suku cadang alat angkutan	-	62.512.100,00	-	62.512.100,00	-
Suku cadang lainnya	-	4.025.500,00	-	4.025.500,00	-
Alat tulis kantor	8.059.300,00	73.282.500,00	280.000,00	74.679.300,00	6.942.500,00
Kertas dan cover	5.898.000,00	61.464.000,00	- 189.000,00	59.703.500,00	7.469.500,00
Bahan cetak	526.000,00	443.006.400,00	- 6.236.000,00	429.258.400,00	8.038.000,00
Benda pos	-	6.489.000,00	-	6.089.000,00	400.000,00
Bahan komputer	-	43.472.000,00	-	40.379.000,00	3.093.000,00
Perabot kantor	820.000,00	36.540.000,00	210.000,00	37.570.000,00	-
Alat listrik	275.000,00	30.670.000,00	-	30.198.000,00	747.000,00
Perlengkapan dinas	28.802.598,00	3.280.000,00	131.290.000,00	134.649.200,00	28.723.398,00
Suvenir/cendera mata	-	4.860.000,00	-	4.860.000,00	-
Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.918.000,00	35.962.000,00	6.425.000,00	40.113.000,00	4.192.000,00
Obat-obatan lainnya	-	642.000,00	-	642.000,00	-
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya	-	280.000,00	- 280.000,00	-	-
Natura	-	890.000,00	-	890.000,00	-
Pakaian dinas lapangan (PDL)	-	7.000.000,00	- 7.000.000,00	-	-
Pakaian sipil resmi (PSR)	-	30.000.000,00	- 30.000.000,00	-	-
Pakaian teknik	-	3.726.000,00	- 3.726.000,00	-	-
Pakaian batik tradisional	-	6.000.000,00	- 6.000.000,00	-	-
Pakaian olahraga	-	84.150.000,00	- 84.150.000,00	-	-

Uraian reklasifikasi:

- Reklasifikasi dari persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya menjadi alat tulis kantor sebesar Rp280.000,00.
- Reklasifikasi dari kertas dan cover menjadi bahan cetak sebesar Rp189.000,00.
- Reklasifikasi dari bahan cetak menjadi alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp6.425.000,00.

- Reklasifikasi dari pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp7.000.000,00, pakaian sipil resmi sebesar Rp30.000.000, pakaian teknik sebesar Rp3.726.000,00, pakaian batik tradisional sebesar Rp6.000.000, dan pakaian olahraga sebesar Rp84.150.000,00 menjadi perlengkapan dinas dengan total sebesar Rp130.876.000,00
- Reklasifikasi dari belanja modal alat peraga praktek sekolah bidang studi: PKN menjadi perlengkapan dinas sebesar Rp414.000,00.
- Reklasifikasi dari belanja modal alat pembersih menjadi perabot kantor sebesar Rp210.000,00.

		2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2	<u>Aset Tetap</u>	<u>Rp9.460.696.563,27</u>	<u>Rp11.927.828.294,66</u>

Aset Tetap pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.460.696.563,27 dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2.1	<u>Tanah</u>	<u>Rp400.000.000,00</u>	<u>Rp400.000.000,00</u>

Saldo Tanah pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp400.000.000,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp400.000.000,00 dan pada tahun 2022 tidak terdapat pengadaan tanah. Asset tanah yang milik Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong dalam klasifikasi tanah persil, lebih detailnya adalah sebagai berikut.

Kode Rekening	Uraian	2022 (Rp)
1.3.01	Tanah	400.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	400.000.000,00
1.3.01.01.01	Tanah persil	400.000.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk bangunan tempat kerja	400.000.000,00

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2.2 <u>Peralatan dan Mesin</u>	<u>Rp13.682.874.588,00</u>	<u>Rp14.840.964.909,00</u>

Saldo Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.682.874.588,00. Terdapat penurunan asset Peralatan dan Mesin dari tahun lalu sebesar Rp1.158.090.321,00 dengan penjelasan perubahan sebagai berikut:

Mutasi tambah	
- Belanja modal peralatan dan mesin	Rp 80.499.000,00
- Mutasi dari belanja gedung kantor ke alat kantor lainnya	Rp 12.321.000,00
- Mutasi dari belanja gedung kantor ke mebel	Rp 93.847.948,00
- Mutase dari belanja gedung kantor ke alat pendingin	Rp 3.121.802,00
	Rp 189.789.750,00
Mutasi kurang	
- Usul penghapusan mesin hitung/mesin jumlah	Rp 1.380.000,00
- Usul penghapusan alat penyimpan perlengkapan kantor	Rp 1.325.000,00
- Usul penghapusan alat kantor lainnya	Rp 207.609.771,00
- Usul penghapusan alat pengukur waktu	Rp 1.542.000,00

- Usul penghapusan mebel	Rp	176.394.300,00
- Usul penghapusan alat pendingin	Rp	199.745.000,00
- Usul penghapusan alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>)	Rp	46.470.000,00
- Usul penghapusan peralatan studio audio	Rp	683.180.000,00
- Usul penghapusan peralatan studio video dan film	Rp	1.950.000,00
- Usul penghapusan personal computer	Rp	27.660.000,00
- Reklasifikasi belanja modal ke perlengkapan dinas	Rp	414.000,00
- Reklasifikasi belanja modal ke perabot kantor	Rp	210.000,00
	Rp	1.347.880.071,00
Jumlah	Rp	1.158.090.321,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp13.682.874.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Alat Besar	793.052.100,00
2	Alat Angkutan	1.826.956.984,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.050.000,00
4	Alat Pertanian	4.040.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.264.618.755,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	762.512.649,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.976.000,00
8	Alat Laboratorium	16.302.000,00
9	Komputer	2.983.576.100,00
10	Rambu-Rambu	15.790.000,00
	Jumlah	13.682.874.588,00

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2.3 <u>Gedung dan Bangunan</u>	<u>Rp7.294.871.816,00</u>	<u>Rp12.788.150.063,00</u>

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.294.871.816,00. Terdapat penurunan asset Gedung dan Bangunan dari tahun lalu sebesar Rp5.493.278.247,00 dengan penjelasan perubahan sebagai berikut:

Mutasi tambah	
- Gabung asset bangunan gedung kantor	Rp 7.083.354.816,00
	Rp 7.083.354.816,00
Mutasi kurang	
- Usul penghapusan bangunan gedung kantor	Rp 5.493.278.247,00
- Gabung asset bangunan gedung kantor	Rp 7.013.299.302,00
- Reklasifikasi asset bangunan gedung kantor ke bangunan gedung instalasi	Rp 70.055.514,00
	Rp 12.576.633.063,00
Jumlah	Rp 5.493.278.247,00

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2.4 <u>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</u>	<u>Rp546.436.413,00</u>	<u>Rp772.038.404,00</u>

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp546.436.413,00. Terdapat penurunan asset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari tahun lalu sebesar Rp225.601.991,00 dengan penjelasan perubahan sebagai berikut:

Mutasi kurang		
- Usul penghapusan jalan khusus	Rp	81.668.290,00
- Usul penghapusan instalasi pengaman penangkal petir	Rp	99.995.870,00
- Usul penghapusan jaringan pembawa	Rp	43.937.831,00
Jumlah	Rp	225.601.991,00

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2.5 Aset Tetap	<u>Rp126.786.300,00</u>	<u>Rp126.786.300,00</u>
<u>Lainnya</u>		

Pada tahun anggaran 2022 tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp126.786.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	100.546.300,00
1.1	Bahan perpustakaan tercetak	100.546.300,00
1.1.1	Buku umum	45.788.700,00
1.1.2	Buku agama	11.461.000,00
1.1.3	Buku ilmu social	31.440.100,00
1.1.4	Buku ilmu Bahasa	9.276.500,00
1.1.5	Buku ilmu pengetahuan praktis	2.580.000,00
2	Barang Bercorak esenian/Kebudayaan/Olahraga	26.240.000,00
2.1	Barang bercorak kesenian	25.415.000,00
2.1.1	Alat music	21.750.000,00
2.1.2	Lukisan	3.665.000,00
2.2	Alat bercorak kebudayaan	825.000,00
2.2.1	Maket, miniature, replica, foto dokumen, dan benda bersejarah	825.000,00
Jumlah		126.786.300,00

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2.6 <u>Konstruksi Dalam Pengerjaan</u>	<u>Rp929.113.200,00</u>	<u>Rp929.113.200,00</u>

Pada tahun anggaran 2022 tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada Konstruksi dalam Pengerjaan. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp929.113.200,00.

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.2.7 <u>Akumulasi</u>	<u>Rp(13.519.385.753,73)</u>	<u>Rp(17.929.224.581,34)</u>
 <u>Penyusutan</u>		

Saldo Akumulasi Penyusutan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp(13.519.385.753,73) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp (12.089.230.383,72)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (1.285.457.177,13)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	Rp (122.948.192,88)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp (21.750.000,00)
	Jumlah	Rp (13.519.385.753,73)

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.3 <u>Aset Lainnya</u>	<u>Rp2.488.305.701,79,00</u>	<u>Rp775.416.500,00</u>

Aset Lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.488.305.701, dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.3.2 <u>Aset Tidak Berwujud</u>	<u>Rp775.416.500,00</u>	<u>Rp775.416.500,00</u>

Saldo Aset Tak Berwujud pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp775.416.500,00, tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.3.3.3 <u>Aset Lain-Lain</u>	<u>Rp1.712.889.201,79,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Aset Lain-Lain pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.712.889.201,79, terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.712.889.201,79,00 karena terdapat usulan penghapusan asset.

Rincian usul penghapusan asset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Aset Tetap	Nomor Dokumen Usulan Penghapusan	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan mesin	404.1.0.0.0/USULHAPUS/RB/04813	0,00
2	Peralatan dan mesin	404.1.0.2.0/USULHAPUS/RB/00570	725.000,00
3	Gedung dan bangunan	404.1.0.0.0/USULHAPUS/RB/04813	1.593.050.669, 62

4	Jalan, irigasi, dan jaringan	404.1.0.0.0/USULHAPUS/RB/04813	119.113.532,17
Jumlah			1.712.889.201,79

3.1.4 Kewajiban

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.4 <u>Kewajiban</u>	<u>Rp34.189.805,00</u>	<u>Rp35.525.813,00</u>

Kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.189.805,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.4.1 <u>Kewajiban Jangka Pendek</u>	<u>Rp34.189.805,00</u>	<u>Rp35.525.813,00</u>

Kewajiban Jangka Pendek Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.189.805,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.4.1.1 <u>Utang Belanja</u>	<u>Rp34.189.805,00</u>	<u>Rp35.525.813,00</u>

Saldo Utang Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2022 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dibayar oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Rp 0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp 34.189.805,00
2.1	Utang belanja jasa	Rp 34.189.505,00
2.1.1	Utang belanja jasa kantor-tagihan telepon	Rp 850.164,00
2.1.2	Utang belanja jasa kantor-tagihan air	Rp 5.406.500,00
2.1.3	Utang belanja jasa kantor-tagihan listrik	Rp 27.933.141,00
	Jumlah	Rp 34.189.805,00

3.1.5 Ekuitas

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.5 <u>Ekuitas</u>	<u>Rp12.002.758.858,06</u>	<u>Rp12.740.917.879,66</u>

Saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar Rp12.002.758.858,06 merupakan kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Ekuitas Awal	Rp 12.740.917.879,66
Surplus/Defisit - LO	Rp (29.371.073.643,63)
RK PPKD	Rp 28.929.974.701,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
Koreksi Nilai Persediaan	00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	00
Lain-lain	Rp (297.060.078,97)
Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp (289.704.250,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp (11.909.437,38)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Rp 4.553.608,41
Ekuitas Akhir	Rp 12.002.758.858,06

Dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan mendasar didapat dari penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan koreksi salah nilai.

3.1.6 Pendapatan-LO

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.6 <u>Pendapatan-LO</u>	<u>Rp652.150.000,00</u>	<u>Rp770.325.000,00</u>

Pendapatan-LO Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp652.150.000,00 semuanya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Pendapatan-LO turun sebesar

Rp118.175.000,00 atau 18,12%. Rincian dari Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

		2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.6.1	<u>Pendapatan Asli Daerah-LO</u>	<u>Rp652.150.000,00</u>	<u>Rp638.400.000,00</u>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp652.150.000,00 terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp598.750.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah sebesar Rp53.400.000,00.

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Retribusi Daerah	598.750.000,00	638.400.000,00	(6,21)
1.1	Retribusi jasa umum	533.770.000,00	633.750.000,00	(15,78)
1.1.1	Retribusi pelayanan Pendidikan	533.770.000,00	633.750.000,00	(15,78)
1.2.	Retribusi jasa usaha	64.980.000,00	4.650.000,00	1.297,42
1.2.1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	64.980.000,00	4.650.000,00	1.297,42
2	Lain-Lain PAD yang Sah	53.400.000,00	0,00	100,00
2.1	Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	53.400.000,00	0,00	100,00
Jumlah		652.150.000,00	638.400.000,00	2,15

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO sebesar Rp533.770.000,00 merupakan hasil dari pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sebesar Rp105.600.000,00 serta pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebesar Rp428.170.000,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO turun sebesar Rp99.980.000,00 atau 18,73%. Penurunan yang cukup signifikan ini terjadi karena terdapat agenda pindah kantor pada akhir tahun 2022 dalam rangka pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga berpengaruh pada pengurangan pelaksanaan assessment center metode kompleks menginap.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp64.980.000,00 merupakan pendapatan dari pemakaian ruangan untuk kantin dan pemakaian ruang usaha koperasi dan fotokopi.

Seluruh pendapatan telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah.

		2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.6.2	<u>Lain-lain</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp131.925.000,00</u>
	<u>Pendapatan Daerah</u>		
	<u>Yang Sah -LO</u>		

Pada tahun 2022 tidak terdapat Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.

3.1.7 **Beban**

		2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.7	<u>Beban</u>	<u>Rp30.023.223.643,63</u>	<u>Rp28.103.015.908,49</u>

Realisasi Beban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.023.223.643,63 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.7.1	<u>Beban Operasi</u>	<u>Rp29.087.171.193,00</u>	<u>Rp26.582.376.112,00</u>

Realisasi Beban Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.087.171.193,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp14.632.055.984,00 serta Beban Barang dan Jasa sebesar Rp14.455.115.209,00.

		2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.7.1.1	<u>Beban Pegawai</u>	<u>Rp14.632.055.984,00</u>	<u>Rp14.398.563.039,00</u>

Realisasi Beban Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.632.055.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.678.564.351,00
1.1	Beban Gaji Pokok ASN	4.137.409.540,00
1.2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	359.774.193,00
1.3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	236.115.000,00
1.4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	139.657.000,00
1.5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.795.000,00
1.6	Beban Tunjangan Beras ASN	232.830.300,00
1.7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.100.389,00
1.8	Beban Pembulatan Gaji ASN	63.230,00
1.9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	392.557.396,00
1.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.475.647,00
1.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	24.786.656,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.871.740.133,00
2.1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.832.707.369,00
2.2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	677.441.850,00
2.3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	115.262.754,00
2.4	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.246.328.160,00
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	81.751.500,00
3.1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	16.531.500,00
3.2	Beban Honorarium	42.720.000,00
3.3	Beban Jasa Pengelolaan BMD	22.500.000,00
Jumlah		14.632.055.984,00

2022 (Audited)

2021 (Audited)

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa **Rp14.455.115.209,00** **Rp12.183.813.073,00**

Realisasi Beban Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.455.115.209,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Barang	2.286.589.000,00
1.1	Beban Barang Pakai Habis	2.286.589.000,00
2	Beban Jasa	9.984.125.784,00
2.1	Beban Jasa Kantor	3.148.769.516,00
2.2	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	543.351.600,00
2.3	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	321.338.118,00
2.4	Beban Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
2.5	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	820.279.000,00
2.6	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.446.431.200,00
2.7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	1.683.956.350,00
3	Beban Pemeliharaan	1.090.054.908,00
3.1	Beban Pemeliharaan Tanah	196.280.628,00
3.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203.898.230,00
3.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	580.076.050,00
3.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.800.000,00
3.5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas	1.094.345.517,00
4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.094.345.517,00
Jumlah		14.455.115.209,00

Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa sebesar Rp414.454.508,00. Belanja barang dan jasa adalah senilai Rp14.869.569.717,00 sedangkan jumlah beban barang dan jasa adalah senilai Rp14.455.115.209,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban bertambah dikarenakan:	
- Pembayaran utang jasa tahun 2021 (tagihan listrik, telepon, dan air bulan Desember 2021)	Rp 35.525.813,00
- Reklasifikasi belanja pemeliharaan gedung kantor	Rp 398.995.000,00
- Selisih saldo persediaan	Rp 14.747.500,00
	Rp 449.268.313,00
Beban berkurang dikarenakan:	
- Reklasifikasi belanja modal	Rp 624.000,00
- Pengakuan hutang jasa tahun 2022 (tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember 2022)	Rp 34.189.805,00
	Rp 34.813.805,00
Jumlah	Rp 414.454.508,00

2022 (Audited)

2021 (Audited)

3.1.7.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp936.052.450,63 Rp1.520.639.796,49

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp936.052.450,63 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	714.205.532,57

	Beban penyusutan alat besar	51.336.157,16
	Beban penyusutan alat angkutan	133.012.633,40
	Beban penyusutan alat bengkel dan alat ukur	310.000,00
	Beban penyusutan alat pertanian	200.000,00
	Beban penyusutan alat kantor dan rumah tangga	226.123.729,37
	Beban penyusutan alat studio, komunikasi, dan pemancar	23.821.750,00
	Beban penyusutan alat kedokteran dan kesehatan	1.995.200,00
	Beban penyusutan alat laboratorium	1.086.800,00
	Beban penyusutan computer	276.319.262,64
	Beban penyusutan rambu-rambu	0,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	200.870.399,30
	Beban penyusutan bangunan gedung	200.870.399,30
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	20.976.518,76
	Beban penyusutan jalan dan jembatan	4.083.414,50
	Beban penyusutan instalasi	16.160.807,08
	Beban penyusutan jaringan	732.297,18
	Jumlah	936.052.450,63

Terdapat selisih beban penyusutan dan amortisasi dengan akumulasi penyusutan pada neraca. Rincian selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian Beban		Uraian Selisih Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dan Awal Tahun		Selisih
Beban Penyusutan dan Amortisasi	936.052.450,63	Akumulasi Penyusutan	-4.409.838.827,61	5.345.891.278,24
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	714.205.532,57	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-632.325.538,43	1.346.531.071,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	200.870.399,30	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-3.692.001.349,11	3.892.871.748,41
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	20.976.518,76	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-85.511.940,07	106.488.458,83
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	-

Selisih tersebut berasal dari:

1. Usulan penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp1.346.531.071,00.
2. Usulan penghapusan Gedung dan bangunan sebesar Rp3.900.227.577,38.
3. Akumulasi penyusutan koreksi salah nilai Gedung dan bangunan sebesar Rp(7.355.828,97).
4. Usulan penghapusan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp106.488.458,83.

3.1.8 Perubahan Ekuitas

	2022 (Audited)	2021 (Audited)
3.1.8 <u>Ekuitas</u>	<u>Rp12.002.758.858,06</u>	<u>Rp12.740.917.879,66</u>

Saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar Rp12.002.758.858,06 merupakan kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	12.740.917.879,66	12.550.846.117,15
Surplus/Defisit - LO	(29.371.073.643,63)	(27.332.690.908,49)
RK PPKD	28.929.974.701,00	27.522.924.271,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	(161.600)
Lain-lain	(297.060.078,97)	
Ekuitas Akhir	12.002.758.858,06	12.740.917.879,66

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2022 didapat dari koreksi ekuitas berupa penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan koreksi salah nilai bangunan gedung kantor dan bangunan gedung instalasi.

Lain-lain terdiri dari :		
- Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	(289.704.250,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp	(11.909.437,38)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Rp	4.553.608,41
	Rp	(297.060.078,97)

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
5. Pengukuran dan sertifikasi kompetensi pegawai;
6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;

9. Fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis, melalui Misi Badan Kepegawaian Daerah DIY yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.**

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penyajian aset tetap di neraca didukung dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset. Sedangkan untuk penyajian persediaan didukung dengan aplikasi e-Persediaan.

Perencanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan

dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Kepala

Badan Kepegawaian Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.✓

NIP 196807131998032003